

**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA  
KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR  
DITINJAU MENURUT UU. No. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**DISUSUN OLEH:**

**SULASAH  
10521001069**

**PROGRAM SI  
JURUSAN AHWAL AL – SYAKHSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Adapun penelitian ini berjudul : **“PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974.** Adapun alasan penulis memilih judul ini karena pada masyarakat desa kecamatan Rimba Melintang banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur dan KUA menikahkan calon mempelai tersebut tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Rimba Melintang, apa alasan pegawai pencatat nikah kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa ada dispensasi Pengadilan Agama, dan bagaimana kedudukan perkawinan tersebut ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menikah pada umur 13- 15 tahun bagi wanita dan 16-19 tahun bagi laki-laki, Pernikahan ini terjadi dikarenakan mereka berpendidikan rendah, ekonomi mereka yang lemah, hamil diluar nikah dan dampak yang terjadi dalam kehidupan mereka setelah menikah masih bergantung pada orang tua, bahkan kondisi ekonomi keluarga mereka kurang baik atau lemah.

Pegawai Pencatat Nikah menikahkan calon mempelai di bawah umur tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pada umumnya masyarakat di kecamatan rimba melintang tidak mengetahui adanya dan perlunya dispensasi nikah, sehingga mereka tidak meminta dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian dikarenakan faktor ekonomi masyarakat disana yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengurus prosedur pernikahan dibawah umur, serta lokasi pengadilan yang jauh letaknya menyebabkan masyarakat disana tidak ingin mengurus dispensasi nikah ke pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rimba Melintang menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pernikahan dibawah umur. Karena penulis memaknai kata “dapat” dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan makna yang bersifat anjuran. Itu berarti boleh-boleh saja bagi masyarakat disana meminta dispensasi Pengadilan dan boleh juga tidak meminta dispensasi Pengadilan apabila mereka ingin melangsungkan pernikahan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Geografis .....	12
B. Demografis.....	15
C. Sosial Ekonomi .....	18
D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama .....	21
E. Adat Istiadat .....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian Pernikahan .....	28
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	36
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	37
D. Tujuan Pernikahan .....	40
<b>BAB IV PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR</b>	
<b>DI KUA KEC. RIMBA MELINTANG KABUPATEN</b>	
<b>ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU. NO. 1</b>	
<b>TAHUN 1974</b>	

A. Penyebab Terjadinya Pernikahan di bawah umur di Kec. Rimba Melintang .....	44
B. Alasan Pegawai Pencatat Nikah Kec. Rimba Melintang Menikahkan Calon Pengantin di Bawah Umur Tanpa Ada Dispensasi Pengadilan Agama .....	51
C. Kedudukan Perkawinan Ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 .....	52

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

## **DAPFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecamatan Rimba Melintang merupakan salah satu Kecamatan yang pada awal sebelum terjadi pemekaran berada dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkalis. Setelah terjadi pemekaran maka Kecamatan Rimba Melintang termasuk dalam wilayah kekuasaan Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Rimba Melintang terdiri dari beberapa Kelurahan diantaranya, Kelurahan Karyamukti, Kelurahan Mukti Jaya, Kelurahan Langgadai Hulu, Kelurahan Langgadai Hilir, Kelurahan Serban Jaya, Kelurahan Rimba Melintang, Kelurahan Teluk Pulau Hulu, Kelurahan Teluk Pulau Hilir.<sup>1</sup>

Kehidupan beragama pada masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari berbagai agama ada yang memeluk agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khonhucu. Dari sekian agama tersebut agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang. Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang tidak menimbulkan perpecahan diantara mereka. Selain dari pada itu kehidupan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari beberapa suku, suku Jawa, Melayu, Minang, Batak dan Cina. Dari berbagai macam suku yang ada pada masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang yang menjadi suku mayoritas

---

<sup>1</sup> Diperoleh dari Arsip di Kantor Camat Rimba Melintang, tahun 2009

adalah suku Jawa. Perbedaan suku, golongan dan agama tidak menjadikan anggota masyarakat tersebut sulit untuk hidup rukun dan saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di Kecamatan Rimab Melintang terdiri dari berbagai profesi diantaranya adalah petani, pedagang, nelayan, wiraswasta, aparat keamanan dan Pegawai Negeri Sipil.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan masalah perkawinan khususnya bagi pemeluk agama Islam, mereka berpegang dan berpedoman kepada Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. di dalam Undang-Undang No I Tahun 1974 dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri yang sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah aqad pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Selanjutnya dalam pasal (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadhah, dan rahmah.<sup>5</sup>

Dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa apabila terjadi pernikahan yang belum mencapai umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan 16 untuk

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2007), h 1.

<sup>4</sup> Depaq RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Islam, 1991, h. 14.

<sup>5</sup> *Ibid*.

calon mempelai perempuan, harus terlebih dahulu meminta dispensasi ke Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Dalam kenyataan yang terjadi bahwasanya di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir banyak terjadi perkawinan di bawah umur dimana perkawinan tersebut terlaksana tanpa adanya dispensasi Pengadilan Agama sedangkan pernikahannya dilaksanakan oleh PPN. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun pada tahun 2006 – 2008 di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terjadi pernikahan di bawah umur sebanyak 13 kasus. Dari 13 kasus yang melaksanakan pernikahan di bawah umur lebih muda atau di bawah umur tersebut mayoritas adalah istri yang memiliki umur lebih muda atau di bawah umur. Pernikahan di bawah umur yang telah terjadi di Kecamatan Rimba Melintang dilaksanakan tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Pernikahan mereka tidak sesuai dengan adanya hukum yang berlaku, tetapi ia juga mendapatkan akta nikah.

Salah satu kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang yakni Sutriah binti Marno dengan Arizal Bin Amiruddin. Dimana isterinya Sutriah Binti Marno berumur 15 tahun sedangkan suaminya Arizal Bin Amiruddin berumur 16 tahun. Kedua pasangan ini melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 021 / 04 /10 / 2007, tanpa disertai syarat dispensasi Pengadilan Agama. Alasan mereka menikah pada usia muda

---

<sup>6</sup> Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *op cit*, h. 18.

dikarenakan faktor keluarga, tidak berpendidikan dan memiliki perekonomian yang rendah.

Kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang yang ke dua adalah Sulastri dengan Suyatno. Sulastri masih berumur 14 tahun sedangkan Suyatno berumur 18 tahun. Sulastri dan Suyatno dinikahkan oleh Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) di Kecamatan Rimba Melintang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20 / 04 / 07 / 2007, mereka menikah tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan Agama. Alasan mereka menikah muda dikarenakan orang tua dari Suyatno mampu untuk menafkahi serta membiayai seluruh kebutuhan rumah tangganya anaknya.

Berdasarkan dari realita yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang bahwasanya banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku serta tidak sesuai dengan administrasi perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lapangan serta menuangkannya kedalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT UU NO 1 TAHUN 1974”**



## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan serta tepat dalam melakukan pembahasan agar mudah dipahami, maka penulis membatasi penelitian ini tentang kasus pernikahan di bawah umur yang berjumlah sebanyak 13 kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang tahun 2006-2008 ditinjau menurut UU No I tahun 1974.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa alasan KUA Kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa izin Pengadilan Agama?
3. Bagaimana kedudukan perkawinan tersebut ditinjau menurut UU No I Tahun 1974

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.

- b. Untuk mengetahui alasan KUA Kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa ada izin Pengadilan Agama.
- c. Untuk mengetahui kedudukan perkawinan tersebut ditinjau dari UU No I Tahun 1974.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi yang melaksanakan pernikahan di bawah umur dan masyarakat pada umumnya di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.Uin Suska Riau
- c. Menambah khasanah kajian Islam dan pengetahuan serta wawasan bagi penulis.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakannya penelitian ini adalah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Alasan penulis memilih lokasi Kecamatan Rimba Melintang adalah dikarenakan banyak kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang, dimana pernikahan tersebut tidak memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama.

## 2 Subjek dan objek penelitian

- a. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, tokoh masyarakat serta alim ulama yang ada di Kecamatan Rimba Melintang.
- b. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Rimba Melintang ditinjau menurut administrasi perkawinan di Indonesia.

## 2. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang melaksanakan pernikahan di bawah umur sebanyak 13 kasus, dimana pernikahan tersebut terjadi tidak ada dispensasi dari Pengadilan Agama dari tahun 2006 – 2008. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini sedikit, maka jumlah keseluruhan populasi tersebut dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari responden yang melaksanakan pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi Pengadilan Agama di Kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir, dan PPN yang menikahkan mereka, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang penulis peroleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi tempat diadakannya penelitian di Kecamatan Rimba Melintang. Observasi dilakukan bertujuan untuk melihat kenyataan atau fakta yang ada dalam praktek.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan dengan caramengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, alim ulama, dan tokoh masyarakat

c. Angket

Penyebaran angket dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang disebarkan

kepada responden. Penyebaran angket ini bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai guna penulisan skripsi ini

#### 6. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Analisa data kualitatif

Analisa data kualitatif adalah data-data yang sudah terkumpul diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, kemudian diuraikan dan dibandingkan yang satu dan yang lainnya. Sehingga memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

##### b. Analisa data kuantitatif

Analisa data kuantitatif adalah data-data yang sudah terkumpul adalah data-data yang tersusun melalui angket akan disusun melalui bentuk tabel-tabel frekuensi atau persentase dibandingkan sehingga memperoleh pemahaman yang luas dari tabel-tabel tersebut.

#### 4. Metode Penulisan

a. Metode Induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

b. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.

- c. Metode Deskriptif, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi dalam:

- BAB I** : Pendahuluan Yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Gambaran umum lokasi penelitian Yang meliputi geografi dan demografi daerah, sosial ekonomi, pendidikan dan kehidupan beragama, serta adat istiadat.
- BAB III** : Tinjauan umum tentang perkawinan Meliputi pengertian perkawinan , dasar hukum perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974.
- BAB IV** : Pelaksanaan Pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir di tinjau menurut administrasi perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari :  
 Apa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Rimba Melintang , Apa alasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa izin Pengadilan Agama di Kecamatan Rimba

Melintang, dan Bagaimana kedudukan perkawinan tersebut  
ditinjau menurut UU Noo I Tahun 1974

BAB V : Penutup yang terdiri dari bab kesimpulan dan saran.





## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Geografis**

Kecamatan Rimba Melintang merupakan salah satu Kecamatan yang dahulunya berada dikawasan Kabupaten Bengkalis. Setelah terjadi otonomi Daerah, Kecamatan Rimba Melintang diambil alih oleh Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan ini terdiri dari beberapa Desa dari satu kelurahan. Kecamatan Rimba Melintang juga mempunyai daerah yang strategis dan jalan lintas ke kota Bagan Siapi-api, dan jalan lintas menuju Medan. Oleh sebab itu Kecamatan Rimba Melintang mudah dikenal banyak orang.

Luas keseluruhan Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah 129,89 KM<sup>2</sup> dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kapur
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanjung Melawan
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Putih.<sup>1</sup>

Jarak tempuh menuju pusat pemerintahan dari Kecamatan Rimba Melintang ke Kelurahan Langgadai Hilir berjarak kurang lebih 19 KM, dari Kecamatan Rimba Melintang ke Kota Bagan Siapiapi berjarak 53 KM. Dan jarak tempuh ke Ibu Kota Profinsi Riau lebih kurang 500 KM. Di Kecamatan ini terdiri dari dataran rendah, tanahnya terdiri dari dua jenis dari dua jenis, yaitu tanah liat (tanah kuning), dan tanah gambut. Oleh karena itu Kecamatan Rimba Melintang merupakan daerah yang cocok untuk bercocok tanam atau

---

<sup>1</sup> Arsip Kantor Camat Rimba Melintang tahun 2008.

perkebunan. Sehingga mata pencarian penduduk di Kecamatan Rimba Melintang mayoritas berusaha dibidang pertanian, kecamatan Rimba Melintang juga mempunyai satu sungai yang disebut dengan Sungai Rokan.

Pada umumnya suhu di Kecamatan Rimba Melintang adalah sub-tropis dengan suhu udara tertinggi sekitar 20-50<sup>0</sup> C. Sedangkan curah hujan di daerah ini pada umumnya berkisar antara 2.000 sampai 3.000 M<sup>2</sup>. Adapun mengenai musim hujan atau musim panas di daerah ini pada dasarnya tidak dapat ditentukan secara pasti namun yang jelas biasanya musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai bulan Desember, sedangkan pada bulan lainnya biasanya agak panas dan juga terjadi kemarau panjang lebih kurang dua bulan. Lokasi Kantor Kecamatan Rimba Melintang berada di Jl Utama Kelurahan Desa Karyamukti, jumlah pegawai yang bekerja di Kantor Camat Rimba Melintang yakni 13 orang. Di Kecamatan Rimba Melintang memiliki fasilitas perkantoran sebagai pendukung untuk menjalankan roda pemerintahan. Fasilitas tersebut yakni Polsek, KUA, Puskesmas, serta Koramil.

Secara administratif wilayah Kecamatan Rimba Melintang terdiri dari 11 Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Karyamukti
2. Kelurahan Rimba Melintang
3. Kelurahan Jumrah
4. Kelurahan Teluk Pulau hulu
5. Kelurahan teluk Pulau Hilir
6. Kelurahan Langgadai Hulu

7. Kelurahan Langgadai Hilir
8. Kelurahan Mukti Jaya
9. Kelurahan Pematang Botam
10. Kelurahan Harapan Jaya
11. Kelurahan Serban Jaya

Setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Rimba Melintang memiliki luas wilayah yang berbeda. Penyebab masing-masing kelurahan memiliki luas wilayah yang berbeda dikarenakan jumlah penduduk disetiap daerah berbeda.

**TABEL I**  
**Luas Wilayah Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Rimba Melintang**

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH	JUMLAH	
		(KM2)	RT	KK
1	Kelurahan Karyamukti	90	26	2225
2	Kelurahan Rimba Melintang	85	20	2125
3	Kelurahan Jumrah	80	15	2000
4	Kelurahan Teluk Pulau Hulu	70	14	1900
5	Kelurahan Teluk Pulau Hilir	75	13	1890
6	Kelurahan Lagadai Hulu	65	12	1600
7	Kelurahan Langgadai Hilir	60	11	1450
8	Kelurahan Mukti Jaya	50	10	1300
9	Kelurahan Pematang Botam	45	9	1250
10	Harapan Jaya	30	8	1200
11	Serban Jaya	25	7	1980
<b>JUMLAH</b>		<b>675</b>	<b>145</b>	<b>18920</b>

Sumber Data: Arsip Kantor Camat Rimba Melintang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Rimba Melintang yakni sebelas kelurahan. Diantara kesebelas kelurahan tersebut kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah kelurahan Karyamukti. Dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Serban Jaya.

## B. Demografi

Berdasarkan data statistik pada Kantor Kecamatan Rimba Melintang bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Rimba Melintang adalah 571.093 Jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Rimba Melintang mayoritas penduduknya adalah berasal dari suku Jawa dan terdapat juga dari suku lain. Sejarah permulaan masyarakat Jawa merantau ke Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir adalah untuk mencari pekerjaan. Setelah memperoleh pekerjaan kemudian berasimilasi dengan penduduk pribumi yang ada di Kecamatan Rimba Melintang Selain dari suku jawa juga terdapat suku Batak, Minang, Melayu, Cina (*Tiong Hoa*).

Adapun tabel yang menjelaskan tentang jumlah penduduk di Kecamatan Rimba melintang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL II**  
**Jumlah Penduduk di Kecamatan Rimba Melintang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	293.316	48,64 %
2	Perempuan	277.777	51,36 %
<b>Jumlah</b>		571.093	100 %

Sumber data : *Kantor Camat Rimba Melintang*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan jumlahnya lebih banyak dari laki-laki sebanyak 293.316 orang ( 51.36 % ), sedangkan perempuan hanya berjumlah 277.777 orang ( 48.64 % ).

Sedangkan tabel yang menjelaskan tentang penyebaran penduduk laki-laki dan perempuan disetiap kelurahan pada masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang adalah:

**TABEL III**  
**Penyebaran Penduduk Setiap Kelurahan di Kec. Rimba Melintang**

NO	Kelurahan	JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN		JUMLAH (JIWA)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kelurahan Karyamukti	35616	34165	69781
2	Kelurahan Rimba Melintang	33165	32525	65690
3	Kelurahan Jumrah	30155	29145	59300
4	Kelurahan Teluk Pulau Hulu	29145	27152	56297
5	Kelurahan Teluk Pulau Hilir	27135	25000	52135
6	Kelurahan Lagadai Hulu	25100	24120	49220
7	Kelurahan Langgadai Hilir	24500	23105	47605
8	Kelurahan Mukti Jaya	23000	21145	44145
9	Kelurahan Pematang Botam	22500	20120	42620
10	Harapan Jaya	22000	21150	43150
11	Serban Jaya	21000	20150	41150
<b>Jumlah</b>		<b>293316</b>	<b>277777</b>	<b>571093</b>

Sumber Data : *Kantor Camat Rimba Melintang.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebaran jumlah penduduk disetiap kelurahan merata di setiap daerah. Pertumbuhan penduduk yang paling padat terletak di kelurahan Karyamukti dan yang paling kecil di kelurahan Serban Jaya.

Tabel yang menjelaskan tentang suku yang terdapat di Kecamatan Rimba Melintang adalah:

**TABEL IV**  
**Jumlah Suku pada Kecamatan**  
**Rimba Melintang**

<b>NO</b>	<b>SUKU</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase</b>
1	Jawa	399.765	70%
2	Melayu	85.664	15%
3	Batak	57.109	10%
4	Minang	28.555	5%
<b>Jumlah</b>		<b>571.093</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: Arsip kantor camat Rimba Melintang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebaran suku yang terbanyak di Kecamatan Rimba Melintang adalah suku Jawa yang berjumlah 399.765 yaitu 70% dari total keseluruhan suku yang ada.

Tabel yang menjelaskan tentang kehidupan pada masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang berdasarkan kepada usia sebagai berikut :

**TABEL V**  
**Jumah Penduduk Berdasarkan Usia**

<b>No</b>	<b>TINGKAT UMUR</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>Persentase</b>
1	0-5 Tahun	85.664	15%
2	6-10 Tahun	114.219	20%
3	25-46 Tahun	142.773	25%
4	46-60 Tahun	228.437	40%
<b>Jumlah</b>		<b>571.093</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Kantor Camat Rimba Melintang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa umur penduduk yang ada di Kecamatan Rimba Melintang mayoritas berusia 46-60 tahun yaitu berjumlah 228.437 jiwa atau 40%. Di posisi kedua umur penduduk yang ada di Kecamatan Rimba Melintang yang berusia 25-46 tahun yaitu 142.773 jiwa atau 25%.

### **C. Sosial Ekonomi**

Di dalam masyarakat, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Rimba Melintang adalah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai suku yaitu suku Jawa, Melayu, Batak, Minang, Cina, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Rimba Melintang dilihat dari sistem sosialnya sangat kuat, hal ini dapat dilihat dalam beberapa kegiatan yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat, seperti dalam upacara perkawinan, upacara kematian, gotong royong dengan saling tolong-

menolongdalam menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan dan lain sebagainya.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam sektor perekonomian masyarakat. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi ekonomi sangat penting guna melihat tingkat kesehjatraan masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, pembangunan yang dilakukan adalah merupakan salah satu usaha menumbuhkan, memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Selain itu pembangunan bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan hidup masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian dengan melakukan berbagai macam usaha dalam kehidupan sehari-hari.

Kesemuanya itu dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Rimba Melintang rata-rata pencahariannya adalah petani, selain bekerja sebagai petani masyarakat yang ada di Kecamatan Rimba Melintang juga ada yang berpropesi sebagai nelayan, pegawai negeri, buruh, dan pedagang. Hal ini sesuai dengan letak Kecamatan Rimba Melintang yang tanahnya cocok untuk pertanian, dengan demikian masyarakat Kecamatan Rimba Melintang mempunyai bermacam-macam jenis tanaman, ada tanaman yang digolongkan tanaman tahunan dan sebaliknya. Untuk lebih jelas dilihat dalam tabel berikut ini:



**TABEL VI**  
**Komoditas Pertanian Berdasarkan jenis dan luas tanaman**  
**Di kecamatan rimba melintang**

<b>No</b>	<b>Jenis Tanaman</b>	<b>Luas Tanaman</b>
1	Kelapa Sawit	100.000 Ha
2	Getah	80.000 Ha
3	Kelapa	70.000 Ha
4	Sawah	50.000 Ha
5	Ladang	30.000 Ha
6	Campuran	20.000 Ha
Jumlah		350.000 Ha

Sumber Data: *Kantor Camat Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman kelapa sawit merupakan komoditas utama di Kecamatan Rimba Melintang Khususnya di Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan bahwa kelapa sawit merupakan jenis tanaman yang menurut anggapan masyarakat nilai ekonomisnya lebih tinggi dibanding dengan komoditas yang lainnya. Pada posisi kedua komoditas unggulan setelah kelapa sawit di Kecamatan Rimba Melintang adalah getah.

Disamping bekerja sebagai petani masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang juga ada yang berprofesi sebagai nelayan, PNS, pedagang, buruh, dan ada juga yang belum memperoleh pekerjaan, sebagaimana tabel berikut ini:

**TABEL VII**  
**Mata Pencaharian Penduduk Kec. Rimba Melintang**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	194.172	34 %
2	Nelayan	182.749	32 %
3	Pegawai Negri Sipil	11.422	2 %
4	Pedagang	131.352	23 %
5	Buruh	22.843	4 %
6	Belum Bekerja	28.555	5 %
<b>Jumlah</b>		<b>571.093</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data: *Kantor Camat Rimba Melintang*.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas kehidupan masyarakat yang berada di Kecamatan Rimba Melintang berprofesi sebagai petani yang berjumlah 194.172 orang atau 34.38%. Pertanian yang digeluti oleh masyarakat Rimba Melintang adalah petani kelapa sawit dan petani kelapa.

#### **D. Pendidikan dan Kehidupan Beragama.**

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan. Oleh Karena itu keberhasilan sebuah pembangunan banyak dipengaruhi oleh seberapa besar pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu pemerintahan di Kecamatan Rimba Melintang telah berupaya agar pendidikan masyarakatnya maju sehingga kualitas Sumber Daya Manusianya juga meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan yang telah ditempuh. Upaya yang telah

dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Rimba Melintang dalam meningkatkan pendidikan adalah dengan cara meningkatkan kualitas system, sarana, prasarana serta fasilitas pendukung dari pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan di Kecamatan Rimba Melintang terbagi menjadi dua bagian yakni lembaga pendidikan formal dan non formal. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Rimba Melintang dari SD ( Sekolah Dasar ) sampai dengan Sekolah Menengah Atas.

**TABEL VIII**

**Jumlah Sekolah di Kec. Rimba Melintang**

<b>JENIS SEKOLAH</b>	<b>TINGKATAN</b>			
	<b>TK</b>	<b>SD</b>	<b>SMP</b>	<b>SMA</b>
Negeri	5	8	9	12
Swasta	1	2	2	3
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>15</b>

Sumber Data : *Kantor Camat Rimba Melintang*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fasilitas-fasilitas pendidikan di Kecamatan Rimba Melintang cukup memadai dalam mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Jumlah sekolah dasar di Kecamatan Rimba Melintang telah cukup banyak yakni 10 sarana pendidikan, begitu juga dengan sarana pendidikan SMP hingga SMA jumlahnya juga telah cukup memadai. Namun yang sangat disayangkan adalah di Kecamatan Rimba Melintang belum memiliki sarana pendidikan Perguruan Tinggi, yang ada hanya sampai jenjang SMA saja.

Masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang merupakan masyarakat yang cinta damai serta selalu hidup rukun tanpa ada perselisihan. Kerukunan diantara ummat beragama tercipta oleh eksistensi norma adat terutama tuntunan agama yang mengikat dan mengarahkan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan terutama kehidupan social, agama selalu menjadi acuan baik dalam bertindak maupun dalam bertingkah laku. Pola kehidupan ummat Islam mengacu kepada acuan dasar ummat Islam. Demikian juga dengan agama Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu semuanya memiliki pola kehidupan yang mengacu dan diwarnai oleh agama yang dianutnya masing-masing.

Tabel yang menjelaskan tentang jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya adalah:

**TABEL IX**  
**Jumlah Penduduk Menurut Agama**

<b>NO</b>	<b>NAMA AGAMA</b>	<b>JUMLAH JIWA</b>	<b>KET</b>
1	ISLAM	503.419	88.15%
2	KHATOLIK	35.750	6.26 %
3	PROTESTAN	27.013	4.73 %
4	HINDU	1.942	0.34 %
5	BUDHA	1.600	0.28 %
6	KONGHUCU	1.315	0.23 %
<b>JUMLAH</b>		<b>571.093</b>	<b>100%</b>

Sumber data: Arsip Kantor Camat Rimba Melintang 2001

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa agama yang menjadi mayoritas adalah agama Islam sebanyak 503.419 orang dengan persentase 88.15%,

kemudian disusul dengan agama Kristen Katolik sebanyak 35.750 orang dengan persentase 6.26%, yang beragama Kristen Protestan berjumlah 27.013 orang dengan persentase 4.73%, sedangkan yang beragama Hindu, Budha serta Khonghucu jumlahnya sangat minoritas.

Agama-agama yang dianut masyarakat Kecamatan Rimba Melintang terdiri dari beberapa agama yakni, agama Islam, agama kristen dan agama Budha. Diantara agama yang ada tersebut, mayoritas yang dianut masyarakat Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir tersebut adalah agama Islam dan Kristen. Untuk lebih jelasnya pernyataan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL X**  
**Jumlah Tempat Ibadah di Kec. Rimba Melintang**

No	Tempat Ibadah	Frekuensi	Persentase
1	Mesjid	26	45,62 %
2	Mushalla	10	17,54 %
3	Gereja	20	35,09 %
4	Vihara	1	1,75 %
<b>Jumlah</b>		<b>57</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : *Kantor Camat Rimba Melintang*

Dari perbandingan jumlah tersebut di atas dapat diketahui bahwa mayoritas yang dianut masyarakat Kecamatan Rimba Melintang adalah agama Islam, sedangkan urutan yang kedua agama Kristen, dan urutan berikutnya adalah agama Budha. Suku Jawa, Melayu, Minang, mayoritas memeluk agama Islam, dan Suku Batak memeluk agama Kristen dan Tiong Hua

memeluk agama Budha. Apabila dilihat dari segi jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut.

#### **E. Adat Istiadat**

Penduduk Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya adalah pribumi yang bersuku Jawa, dan sebagian masyarakat lainnya adalah pendatang dari luar daerah tersebut, mereka menetap dan membawa adat istiadat ini yang kemudian mereka kembangkan dalam kehidupannya. Karena penduduk daerah tersebut terdiri dari berbagai suku, maka dalam adat istiadat yang mereka lakukan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sehari-harinya, seperti dalam perkawinan, kenduri (mendoa), khitanan, khatam Qur'an dan lain sebagainya.

Khusus dalam acara perkawinan antara suku satu dan yang lain tidak menjadi persoalan asal menunjukkan adanya kesanggupan dan kesesuaian antara kedua belah pihak ( calon mempelai laki-laki dan perempuan) serta telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua mereka, bila mana sudah ada persetujuan antara laki-laki dan perempuan maka untuk menguatkan hubungan diantara mereka, maka orang tua laki-laki atau perempuan atau perempuan perlu sekali mencari orang yang menjadi kepercayaan untuk melanjutkan hubungan diantara kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk menanyakan tentang keadaan pejaka atau gadis tersebut kepada orang tuanya, bahwa hubungan diantara keduanya sudah menandakan keserasian apabila dijodohkan untuk menjadi suami –istri. Karena mereka telah saling kenal

mengenal tentang watak, kelakuan, dan sifat-sifatnya lalu yang ada pada kedua insan tersebut. Proses seperti ini kemudian melangkah kepada tanda jadi, dimana pihak laki-laki memberikan sedikit barang berupa pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Tanda perundingan diteruskan atau supaya gadis tersebut jangan diambil oleh orang lain yang disebut dengan istilah “*tunangan*”.

Setelah pertunangan dilaksanakan maka selanjutnya adalah acaranya pembinaan rumah tangga yang lebih dahulu diawali dengan akad nikah, biasanya dilaksanakan pada peresmian, tetapi ada juga dilakukan lima hari sebelum peresmian. Dan bagi keluarga yang mampu biasanya acara peresmian diadakan secara besar-besaran dan ada kalanya juga secara kecil-kecilan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk semakin bertambah semaraknya acara peresmian bagi keluarga yang mampu, pada malam peresmian diadakan acara muda-mudi dengan mengadakan pertunjukan band, orgend dan kesenian lainnya.

Biasanya adat setelah peresmian, mempelai laki-laki tinggal di rumah orang tua perempuan dan itu tidak berselang lama, hanya beberapa hari atau bulan. Kemudian sang laki-laki (suami) harus berusaha semaksimal mungkin sampai bisa membuat rumah sendiri walaupun kecil, karena itu sudah merupakan adat kebiasaan masyarakat pedesaan.

Acara-acara seperti ini biasanya juga dilaksanakan pada pelaksanaan khitanan. Acara tersebut disusun rapi sebagaimana mestinya bagi anak yang ingin melaksanakan khatam Qur'an biasanya diadakan pengiringan bersama

teman-temannyayang diiringi dengan kesenian kompong, setelah selesai khatam Qur'an malam itu juga anak dikhitankan dan bagi para Bapak-bapak undangan dimintak untuk "*maulud atau kompong*" (tidak tidur semalaman). Juga mengadakan wirit akbar dalam acara bulanan dan yang demikian ini dilaksanakan sampai saat sekarang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ramli Harrofie, *Wawancara*, Camat Rimba Melintang 2009



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

##### A. Pengertian Pernikahan

###### 1. Menurut Hukum Islam

Di dalam Islam pernikahan disebut dengan “Nikah” , kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu “*Nikaahun*” sinonimnya *tazawwaju*.<sup>1</sup>

Menurut bahasa nikah berarti *ad-dhammu wattadakhul* (bertindih) pemakaian yang termashyur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad, di dalam alqur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.<sup>2</sup>

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti dua akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata lafaz *nikah* atau *tazjwid*.<sup>3</sup>

Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda, namun inti mereka memiliki sesuatu rumusan yang secara substansial sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mengartikan nikah dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: “Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.”<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), Cet. 1, h. 11

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

2. Menurut golongan Malikiyah “Nikah” diartikan dengan:

عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها بينه قلبه غير عالم عاقده  
حرماتها بان حرمها الكتاب على المشهور او الاجماع.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagai lazimnya diharamkan oleh al-Qur ‘an atau oleh ijma.”<sup>5</sup>

3. Golongan Syafiiyah mengartikan dengan:

عقد بتضمن ملك وطء بلفظ نكاح او معناها

Artinya: “ Akad mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata yang semakna dengan keduanya.”<sup>6</sup>

4. Golongan Hanabilah mengartikan nikah dengan ungkapan :

عقد بلفظ نكاح او تزوج المتعة الاستمتاع

Artinya: “Akad yang diucapkan dengan lafaz kata atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang”.<sup>7</sup>

Dan definisi-definisi yang telah diungkapkan diatas sering terdapat kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut dengan “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara

---

<sup>4</sup> Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al'arba'ah* (Libanon : Daar aI-fikr, 1989) Juz IV h.1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>8</sup> Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Menurut syara' hakikat nikah adalah akad antara calon laki-laki dan wanita untuk membolehkan keduanya untuk bergaul sebagai suami dan isteri.<sup>9</sup>

Disamping kata nikah, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan untuk *Zawaj*, kata nikah mengandung dua pengertian yaitu arti yang sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaz). Didalam arti yang sebenarnya nikah itu berarti “Berkumpul”. Sedangkan dalam arti kiasan “Akad” atau “mengadakan perjanjian perkawinan”.<sup>10</sup>

Amir Syarifuddin merumuskan arti dari pernikahan adalah “suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 8.

<sup>9</sup> Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: CV: Al-Hidayah, 1964), Cet.2, h.1.

<sup>10</sup> Rahman Ghazali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: PT: Prenada Media Group, 2003), Cet. 2, h. 7.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: PT: Prenada Media Group, 2003), cet 1, h. 74.

Dalam buku pokok-pokok hukum Islam, Asaf A.A menerangkan bahwa pernikahan menurut pandangan Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama :

1. Dilihat dari aspek hukum pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat, seperti dalam firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا



Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>12</sup>

Menurut Soemayati perjanjian dalam pernikahan ini merupakan tiga karakter yang khusus yaitu:

- a. Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak laki-laki dan perempuan yang mengikat persetujuan pernikahan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- c. Persetujuan pernikahan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, ( PT. Karya Toha Putra : Semarang, 1995 ), h.

<sup>13</sup> Suemayati, *op.cit*, h. 10.

2. Dilihat dari aspek sosial, pernikahan memiliki arti penting yaitu:
  - a. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan pernikahan atau pernah melakukan atau mempunyai kedudukan yang lebih baik dihargai dari pada mereka dengan pernikahan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena itu sebagai isteri dan wanita mendapatkan hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalat yang tadinya masih terbatas harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
  - b. Sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam peraturan mengenai poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang isteri, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>14</sup>
3. Dilihat dari aspek agama, Lili Rosjidi mengatakan sebagai berikut:  
Bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilaksanakan. Jika seseorang hendak melakukan pernikahan dengan tujuan yang sifatnya sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan. Agama Islam tidak memperkenankannya. Islam memandang dan menjadikan pernikahan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur sebab pernikahan tidak hanya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi dikaitkan dengan ikatan batin dan juga jiwa.<sup>15</sup>

Jadi menurut ajaran Islam, perkawinan itu tidak hanya sebagai suatu persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami dan isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

## **2. Menurut UU. No. 1 Tahun 1974**

Pengertian pernikahan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun, 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ikatan lahir adalah ikatan formal, merupakan ikatan yang dapat dilihat, yang mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Ikatan batin adalah ikatan formal, berupa perasaan-perasaan yang menghubungkan keduanya, seperti cinta, rindu, kasih sayang dan perasaan lain untuk saling memerlukan satu sama lain, juga telah matang jiwa dan raganya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Jakarta: PT: Remaja Rosada Karya, 1991), Cet. 1, h. 7.

<sup>16</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet.2, h..242

Menurut Dr.Anwar Haryono S.H. pengetahuan pernikahan adalah suatu perjanjian (akad) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera.

Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makhruf, sakinah, mawaddah warahmah)
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, materil maupun spiritual.<sup>17</sup>

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menguraikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan dan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>18</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakramen, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah allah SWT serta mengikuti sunnah tauladan rasulnya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tala Hukum Indonesia* (Jakarta Gema Insani Press, I 994),Cet. 1, h.78

<sup>19</sup> *Ibid*

### 3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2).<sup>20</sup> Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah (Pasal 3).

### 4. Menurut PP No. 9 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memuat tentang pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, bahwa berdasarkan PP. NO. 9 Tahun 1975 telah ditetapkan mengenai tata cara pernikahan pada pasal 10, yang berbunyi :

Ayat ( 1 ) : Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud pada pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

Ayat ( 2 ) : Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Adapun ketentuan pernikahan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi persyaratan pernikahan dan tidak terdapat halangan pernikahan menurut undang-undang sesuai dengan pasal 6 ayat 1 PP. No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “ Pegawai Pencatat yang menerima

---

<sup>20</sup> Inpres No. 1 Tahun 1991, h. 19.



pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipengaruhi telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.”

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau mubah. Namun tidak hanya mubah saja. Tetapi juga dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi, firman Allah dalam surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “ Dan kawinilah orang – orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba- hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya.<sup>21</sup>

Hadist Nabi SAW dari Anas bin Malik

تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الامم يوم القيامة

<sup>21</sup> Depag RI, *op cit*, h. 132

Artinya : “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaumku di hari kiamat.”

Begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan itu adalah perbuatan yang disenangi untuk dilakukan. Untuk melaksanakan pernikahan terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas'ud mutafaqun alaih yang berbunyi

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء

Artinya : “ Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dari segi *al-baah* hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari pernglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu. “

### C. Rukun dan syarat pernikahan

Menurut syari'at Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat dalam perkawinan adalah:

### 1. Rukun nikah

- a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan qabul

### 2. Syarat nikah

- a. Calon Suami, syaratnya :
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Jelas laki-lakinya (bukan banci)
  - 3) Tidak dipaksa
  - 4) Tidak Terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat untuk calon mempelai perempuan
  - 1) Beragama Islam
  - 2) Jelas wanitanya
  - 3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya
  - 4) Tidak Terdapat halangan perkawinan.

### 3. Wali Nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah Seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akhil baligh. Didalam riwayat Abu Burdah Ibn Abu Musa dari Bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah S.a.w bersabda :

لا نكاح الا بولي

Artinya : “ Tidak sah Nikah kecuali dengan wali.”

#### 4. Saksi

Dalam pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dapat menjadi saksi dalam akad nikah yaitu seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuna rungu atau tuli. Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam mengatakan saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Adapun dalil tentang dua orang saksi, yaitu:

**لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل**

Artinya : “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi.”

#### 5. Ijab dan Qabul

Pelaksanaan akad nikah atau ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab atau akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah atau wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.

Sedangkan yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi atau dalam hal-hal tertentu ucapan menerima atau qabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan memberikan kuasa secara tertulis.

Adapun syarat ijab Qabul adalah :

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- c. Memakai kata-kata nikah

- d. Antara Ijab dan Qabul bersambung
- e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang Ijab Qabul tidak dalam haji

#### D. Tujuan Pernikahan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasulullah Saw.<sup>22</sup> Hal ini juga terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Tentang Hukum-hukum Allah Swt (Syari'ah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet I, h. 150.

<sup>23</sup> Depag RI, *op.cit*, h. 644.

Dan di ayat lain Allah SWT berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72 yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ  
 أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
 وَبِئَعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>24</sup>

Rasulullah Saw memerintahkan ummat Islam agar segera menikah pada saat ia mampu. Keluarga merupakan inti masyarakat Islam, Dengan menikah merupakan cara untuk membentuk lembaga masyarakat yang terkecil. Sedangkan hubungan suami isteri diluar nikah merupakan perbuatan terkutuk dan terlarang.<sup>25</sup> Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”<sup>26</sup>

Islam telah menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur fungsi keluarga sehingga dengan perkawinan yang sah kedua suami isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan, dan ikatan kekerabatan. Unsur-

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 412.

<sup>25</sup> A. Rahman I, *op.cit*, h. 152.

<sup>26</sup> Depag RI, *op.cit*, h. 429.

unsur ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan yang paling besar adalah ibadah kepada Allah SWT. Ibadah disini bukan hanya upacara ritual biasa saja contohnya hubungan suami dan isteri. Hubungan tersebut pada hakikatnya mencakup berbagai amal yang baik dalam seluruh aspek kehidupan.

Apabila suami isteri itu memperhatikan tujuan utamanya, maka pernikahan memiliki tujuan pokok yakni bersatunya kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk saling membantu dan mencapai tujuan pokok yang akan dicapai. Dalam pernikahan bukan hanya mencapai keinginan birahi saja akan tetapi harus mencapai tujuan pokok yakni bersatunya kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat belajar saling menghargai satu sama lain, mencintai Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan serta kekurangan mereka.

Tujuan adanya pernikahan yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang bertujuan untuk memperoleh keturunan. Setelah menikah akan memperoleh keturunan yakni anak-anak yang merupakan amanah Allah SWT dan dapat menimbulkan kasih sayang kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Imran ayat 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ ۖ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”<sup>27</sup>

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan untuk mencintai seorang wanita, cinta terhadap anak, dan mencintai harta kekayaan. Melihat uraian di atas, imam Ghazali mengemukakan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima bagian yakni:

1. Mendapatkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan sahwaat dan menumpahkan kasih sayang
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang harmonis, tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Depag RI, *op.cit*, h. 77.

<sup>28</sup> Abdul. Rahman Ghazali, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. 2, h.



**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA**  
**KECAMATAN RIMBA MELINTANG KABUPATEN**  
**ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT**  
**UU. NO. 1 TAHUN 1974**

**A. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Rimba Melintang.**

Sebagai mana yang telah tercantum pada bab sebelumnya bahwa masyarakat Kecamatan Rimba Melintang ada yang melaksanakan pernikahan di bawah umur, untuk mengawali angket yang penulis sebarakan kepada masyarakat Kecamatan Rimba Melintang menanyakan tentang umur berapakah responden ketika menikah, dan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**TABEL.1.1**  
**Umur Para Responden Ketika Menikah**

<b>NO</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	12-13 Tahun	12	46,15%
2	14-16 Tahun	8	30,77%
3	17-19 Tahun	6	32,08%
<b>Jumlah</b>		<b>26</b>	<b>100%</b>

Sumber data: berdasarkan angket yang disebar

Berdasarkan tabel diatas penulis dapat jabarkan bahwa yang menikah pada umur 12-13 tahun sebanyak 12 orang ( 46, 15 %) dan yang menikah pada umur 14-16 tahun sebanyak 8 orang ( 30, 77%) , sedangkan yang menikah pada umur (17 – 19 tahun sebanyak 6 Orang ( 23,08%). Penulis dapat katakan bahwa masyarakat disana yang menikah pada umur 12-14 tahun adalah perempuan ( istri) dan yang menikah pada umur 16-19 tahun adalah laki-laki (suami ).

Kemudian penulis menanyakan kepada responden tentang siapakah yang lebih muda antara suami dan istri ketika mereka menikah dan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**TABEL 1.2**  
**Umur Yang Lebih Muda Antara Suami**  
**Dan Istri Ketika Mereka Menikah**

<b>NO</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Suami	0 orang	0%
2	Isteri	26 orang	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber data: berdasarkan angket yang telah disebarakan

Angket diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari 26 orang responden ( 13 pasang suami istri). Mereka menjawab bahwa diantara mereka istrilah yang paling muda ketika mereka menikah. Dan ini dapat dilihat pada tabel diatas

sebanyak 26 orang ( 100%) menjawab umur isri yang paling muda mereka menikah.

Setelah penulis menanyakan kepada responden tentang umur mereka dan siapakah yang lebih muda diantara mereka ketika menikah, kemudian penulis menanyakan kepada responden mengapa mereka melakukan pernikahan di bawah umur, apa penyebab mereka menikah muda sebagai berikut :

**TABEL .1.3**  
**Penyebab Responden Melakukan**  
**Pernikahan di Bawah Umur**

<b>NO</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Karna putus sekolah	13	50,00%
2	Karena ekonomi	7	26,93%
3	Karena hamil diluar nikah	2	7,69%
4	Di jodohkan orang tua	4	15,38%
<b>JUMLAH</b>		<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Sumber data: berdasarkan angket yang disebar

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dikarenakan responden tersebut putus sekolah dengan jumlah 13 orang (50 % ), ada yang menikah karena ekonomi keluarga mereka lemah sehingga mereka menikah muda dengan jumlah 7 orang ( 26, 93 %), kemudian ada yang menikah dikarenakan hamil diluar nikah sebanyak 2 orang ( 7,69% ), dan yang dijodohkan orang tua sebanyak 4

orang (15,38%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama responden menikah di bawah umur dikarenakan putus sekolah sebanyak 13 orang ( 50 %).

Melakukan pernikahan tentunya melalui prosedur-prosedur pernikahan baik itu dari Kantor Urusan Agama maupun dari Pengadilan Agama. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang bahwa responden yang melakukan pernikahan di bawah umur tidak melalui dispensasi Pengadilan Agama, oleh karena itu penulis ingin menanyakan kepada responden mengapa mereka menikah tanpa ada izin Pengadilan Agama sebagaimana yang penulis cantumkan pada tabel berikut ini:

**TABEL 1.4**

**Alasan Responden Melakukan Pernikahan  
Tanpa Dispensasi Pengadilan Agama**

<b>NO</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Tidak disuruh KUA	6 orang	13,07 %
2	Karena ada hubungan keluarga	2 orang	7,69 %
3	Karena tidak tahu sama sekali	18 orang	69,24 %
<b>jumlah</b>		<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Responden menyatakan bahwa mayoritas mereka menikah di bawah umur tanpa ada dispensasi Pengadilan Agama karena mereka sama sekali tidak mengetahui prosedur pernikahan baik di Kantor Urusan Agama maupun di Pengadilan Agama dengan jumlah responden terbanyak 18 orang ( 69, 24 %)

Biasanya dalam pernikahan itu ada yang merestui mereka menikah yaitu orang tua. Penulis menanyakan kepada respon melalui angket apakah orang tua merestui mereka menikah pada usia muda, dan ini penulis tuangkan pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 1.5**  
**Restu Orang Tua Terhadap**  
**Responden yang Menikah di Bawah Umur**

<b>NO</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Merestui	18 orang	69,24 %
2	Kurang merestui	6 orang	23,07 %
3	Tidak merestui	2 orang	7,69 %
<b>Jumlah</b>		<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Dengan memperhatikan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua merestui anaknya menikah pada usia muda dan ini terbukti dengan jumlah jawaban responden 18 orang ( 69,24 %) mengatakan orang tua mereka merestui pernikahannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Rimba Melintang adalah disebabkan karena keadaan ekonomi mereka yang tidak memadai, hamil di luar nikah, perjudohan orang tua, namun kebanyakan penyebab terjadinya itu semua karena responden tersebut putus sekolah.

Setiap orang yang menikah tentunya akan mengalami kehidupan yang baru yaitu suami, istri, dan anak. Penulis ingin menanyakan kepada semua responden tentang dimanakah mereka tinggal setelah mereka menikah apakah mereka akan tinggal dirumah kontrak, bersama orang tua, atau sudah mempunyai rumah sendiri. Dan ini penulis tuangkan pada tabel berikut ini:

**TABEL 1.6**

**Tempat Tinggal Responden**

**Setelah Menikah**

<b>NO</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Rumah orang tua	18 orang	69,24 %
2	Rumah kontrakan	8 orang	30,76 %
3	Rumah sendiri	-	0%
<b>jumlah</b>		<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada satu pun responden yang mempunyai rumah sendiri setelah mereka menikah, kebanyakan mereka tinggal bersama dirumah orang tua. Setelah mereka menikah dengan jumlah jawaban sebanyak 18 orang ( 69,24 %), sedangkan yang tinggal dirumah kontrak hanya berjumlah 8 orang ( 30,76),

Dengan tinggalnya responden bersama orang tua mereka atau tinggal dirumah kontrakan, penulis ingin menanyakan kepada mereka tentang kondisi perekonomiaan mereka. Dikarenakan mereka menikah di bawah umur, lalu

tidak mempunyai rumah sendiri bagaimanakah kondisi perekonomian keluarga mereka setelah menikah dan ini dapat dilihat tabel dibawah ini :

**TABEL. 1.7**  
**Kondisi Perekonomian Responden**  
**Setelah Menikah**

<b>NO</b>	<b>Alternatif jawaban</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Baik	4 orang	15,39 %
2	Kurang baik	12 orang	46, 15%
3	Tidak baik	10 orang	38,,46%
<b>jumlah</b>		<b>26 orang</b>	<b>100%</b>

Kondisi perekonomian responden berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa ekonomi mereka kurang baik setelah menikah dengan jumlah sebanyak 12 orang ( 46,15 % ), ada juga yang kondisi ekonomi tidak baik sebanyak 10 orang ( 46,15%), sedangkan perekonomian yang baik setelah menikah hanya 4 orang saja ( 15, 39 %).

Berdasarkan hal diatas dapat penulis katakan bahwa responden yang melakukan pernikahan dibawah umur karena tidak sekolah dan ekonomi yang sulit sehingga mereka banyak yang tinggal bersama orang tua mereka dan kondisi perekonomian mereka kurang baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iihat tabel 1.3 dan tabel 1.6

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dampak terjadinya pernikahan di bawah umur bahwa kebanyakan responden yang menikah di bawah umur masih tinggal bersama dengan orang tua mereka, dan kondisi ekonomi mereka setelah menikah tidak baik atau kurang memadai.

**B. Alasan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rimba Melintang Menikahkan Calon Pengantin Di Bawah Umur Tanpa Ada Dispensasi Pengadilan Agama.**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rimba Melintang menjadikan alasan menikahkan calon mempelai di bawah umur tanpa adanya dispensasi pengadilan adalah :

1. Faktor lokasi

Kabupaten Rokan Hilir berada di Ibu kota Kabupaten yaitu Kabupaten Bagan Siapi-api, sedangkan jarak antara Kecamatan rimba melintang dengan Ibu kota kabupaten sangat jauh yaitu lebih kurang 53 km. Sementara, Pegawai Pencatat Nikah yang mengatur segala urusan pernikahan di kecamatan tersebut harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat agar masyarakat tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan secepatnya sehingga membuat Pegawai Pencatat Nikah mengambil keputusan untuk menikahkan calon pengantin di bawah umur tanpa adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Syafrizal, *Wawancara*, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Rimba Melintang, 3 Desember 2009



## 2. Faktor Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Rimba Melintang pada umumnya memiliki kondisi ekonomi menengah kebawah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden bahwa apabila mereka ingin menikah mereka akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sementara ekonomi mereka tidaklah mampu untuk mengurus semua biaya administrasi baik di KUA maupun ke Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

## 3. Faktor Pendidikan

Adapun latar belakang pendidikan masyarakat Kecamatan Rimba Melintang pada umumnya hanya tamat SD, dan SMP. Penyebab inilah yang membuat mereka tidak mengetahui adanya dispensasi Pengadilan Agama tentang pernikahan di bawah umur. Menurut pengetahuan masyarakat disana bahwa yang penting pernikahan itu sah menurut agama, padahal secara administari masih ada persyaratan yang harus dilengkapi apabila menikah di bawah umur, dan itulah yang tidak mereka ketahui.

### **C. Kedudukan Perkawinan Ditinjau Menurut UU. No. 1 Tahun 1974**

Perkawinan pada dasarnya terjadi atas persetujuan dari kedua calon mempelai dan pernikahan mempunyai rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mempelai agar perkawinan tersebut sah. Sebagaimana yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya bahwa secara agama pernikahan mempunyai rukun dan syarat tertentu agar sahnya suatu

---

<sup>3</sup> Sutriah dan Arizal, *Wawancara*, Pasangan Menikah di bawah umur, 10 Desember 2009

pernikahan, namun pada dewasa ini pernikahan tidak hanya sah menurut agama saja akan tetapi juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Namun syarat-syarat pernikahan di dalam UU. No. 1 Tahun 1974 mempunyai persyaratan lain, sebagaimana yang tertulis pada pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.

Ayat (2): Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita.

Berdasarkan pasal diatas dapat penulis jabarkan bahwa dalam perkawinan hanya diizinkan bagi yang mencapai umur 19 tahun bagi pria dan umur 16 tahun bagi wanita, Sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 7 ayat (2) diatas terdapat kata “ dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama “. Adapun makna penyimpangan dalam pasal ini adalah pria dan wanita yang ingin menikah namun belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penulis mencoba menganalisa kata “ dapat “ pada pasal tersebut bahwa ia mempunyai dua makna, yaitu pertama bermakna wajib, dan kedua bermakna anjuran. Apabila kata “ dapat “ tersebut bermakna wajib, maka bagi yang menikah di bawah umur apabila ingin menikah wajib meminta dispensasi dari

pengadilan untuk bisa melangsungkan perkawinan, dan apabila tidak meminta dispensasi ke pengadilan maka secara hukum perkawinannya tidak sah. Dan apabila kata “dapat” tersebut bermakna anjuran, maka bagi yang menikah di bawah umur apabila ingin menikah boleh meminta dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, dan apabila tidak meminta dispensasi ke pengadilan perkawinan mereka tetap sah karena makna kata “dapat” dalam pasal tersebut hanya bersifat anjuran, maka boleh menikah dengan meminta dispensasi pengadilan dan boleh juga tidak memintanya.

Sementara dalam PP No. 9 Tahun 1975 memperkuat tentang adanya dispensasi pengadilan bagi orang yang menikah di bawah umur pada UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana pada pasal 6 ayat 2 ( e ) yang berbunyi : “ Dispensai Pengadilan / pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.”

Adapun pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita. “ Ini menunjukkan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 ( sembilan belas ) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun”, perlu meminta dispensasi Pengadilan Agama.

Apabila seseorang menikah dibawah umur ( belum mencapai umur yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan ) maka seseorang tersebut dapat meminta Dispensasi Pengadilan agar bisa melangsungkan pernikahan,

perlunya dispensasi tersebut diperkuat dengan adanya PP. No. 9 Tahun 1975 pada pasal 6 ayat 2 point "e" yaitu apabila berlaku pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-undang Perkawinan maka diperlukan dispensasi pengadilan.

Berlandaskan dari analisa penulis terhadap makna kata " dapat " pada pasal 7 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa penulis lebih cenderung memilih kata " dapat " tersebut dengan makna yang bersifat anjuran dikarenakan jika didalam pasal tersebut menggunakan kata " harus " meminta dispensasi Pengadilan Agama, maka penulis akan lebih cenderung memaknai dengan kewajiban. Apabila seseorang menikah di bawah umur wajib meminta dispensasi Pengadilan agar pernikahan mereka sah secara agama dan hukum, namun apabila tidak meminta dispensasi Pengadilan maka pernikahan di bawah umur secara hukum pernikahan mereka tidak sah.

Oleh karena itu, penulis lebih cenderung memaknai kata " dapat " tersebut dengan makna yang bersifat anjuran, karena apabila seseorang menikah di bawah umur maka undang-undang menyatakan "dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama", itu berarti bahwa apabila mereka masih di bawah umur dan ingin menikah boleh meminta dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan mereka, dan apabila tidak meminta dispensasi ke Pengadilan Agama perkawinan mereka tetap sah secara hukum dikarenakan hanya bersifat anjuran yaitu boleh menikah dengan meminta dispensasi Pengadilan dan boleh juga dengan tidak memintanya.

Penulis mencoba mengambil landasan di dalam kaidah ushul fiqh dalam memaknai kaidah amar, dimana di dalam ushul fiqh kaidah amar mempunyai banyak makna, adapun diantaranya :

1. الاصل فى الامر للوجوب

Artinya : “Asal pada amar itu memfaedahkan wajib.”

2. الاصل فى الامر للنداب

Artinya : “Asal pada amar itu memfaedahkan anjuran.”<sup>4</sup>

Berdasarkan landasan di atas, penulis mencoba menganalisa kata “ dapat “ pada pasal 7 ayat ( 2 ) dengan dua makna, yaitu makna “ harus atau wajib “ dan bermakna “ anjuran “.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir bahwa masyarakat disana menikah di bawah umur, dimana Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang menikahkan calon mempelai yang di bawah umur tanpa meminta dispensasi Pengadilan Agama yang dikarenakan beberapa alasan yang telah dipaparkan diatas.<sup>5</sup> Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rimba Melintang penuh dengan pertimbangan-pertimbangan agar tidak menyulit masyarakat disana untuk dapat melangsungkan pernikahan sekalipun umur mereka masih di bawah umur.

---

<sup>4</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Ushul Fiqh Sebuah Pengantar*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004 ), cet. I, h. 151.

<sup>5</sup> Lihat h. 51

Secara hukum, Undang-undang perkawinan menyatakan apabila terjadi penyimpangan dalam perkawinan ( penyimpangan batas usia menikah ) maka dapat meminta dispensasi Pengadilan Agama. Sementara, kasus yang terjadi di Kecamatan Rimba Melintang yaitu terjadi penyimpangan batas usia menikah dimana masyarakat disana menikah di bawah umur. Menurut penulis pernikahan mereka tetap sah baik secara agama maupun secara hukum, karena berlandaskan pasal 7 ayat ( 2 ) undang-undang perkawinan penulis memaknai kata “ dapat “ pada pasal tersebut bahwa kata tersebut bersifat anjuran saja, bahwa boleh bagi masyarakat Rimba Melintang meminta dispensasi Pengadilan Agama apabila ingin melangsungkan pernikahan, dan boleh juga bagi masyarakat disana tidak meminta dispensasi Pengadilan Agama apabila ingin menikah, dan itu berarti pernikahan mereka dicatat dan mendapat buku akta nikah karena menurut penulis pernikahan mereka sah secara agama dan secara hukum.

Mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat pada pasal 22 UU. No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”. adapun mengenai pasal ini penulis mencoba kembali menganalisisnya bahwa apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka perkawinan dapat dibatalkan, menurut penulis kata “ dapat ” disini juga mempunyai dua makna, bisa bermakna “ wajib “ dan bisa bermakna “ anjuran “, apabila dapat dibatalkan disini bermakna wajib maka perkawinan yang belum memenuhi persyaratannya wajib dibatalkan. Namun apabila dapat dibatalkan disini

bermakna anjuran maka pernikahan yang belum memenuhi persyaratannya boleh dibatalkan jika ada dari pihak keluarga yang menuntut dan boleh juga tidak dibatalkan.

Penulis juga lebih cenderung memaknai kata “ dapat “ dalam pasal ini dengan makna anjuran sebab tidak semua pernikahan di bawah umur itu dibatalkan pernikahannya dan belum ada juga yang menuntut untuk meminta dibatalkannya pernikahan di bawah umur. Apabila ada pihak keluarga yang ingin menuntut untuk dibatalkan pernikahan tersebut maka boleh dibatalkan, dan boleh juga pernikahan itu tidak dibatalkan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas dan pembahasan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Kebanyakan masyarakat di Kecamatan Rimba Melintang menikah pada umur 13- 15 tahun bagi wanita dan 16-19 tahun bagi laki-laki, Pernikahan ini terjadi dikarenakan mereka berpendidikan rendah, ekonomi mereka yang lemah, hamil diluar nikah dan kehidupan mereka setelah menikah masih bergantung pada orang tua.
- b. KUA menikahkan calon mempelai di bawah umur tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama karena ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Pada umumnya masyarakat di kecamatan rimba melintang tidak mengetahui adanya dan perlunya dispensasi nikah, sehingga mereka tidak meminta dispensasi dari Pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian dikarenakan faktor ekonomi masyarakat disana yang tidak memadai sehingga tidak dapat mengurus prosedur pernikahan dibawah umur, serta lokasi pengadilan yang jauh letaknya menyebabkan masyarakat disana tidak ingin mengurus dispensasi nikah ke pengadilan.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Rimba Melintang menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang pernikahan dibawah umur. Karena penulis



memaknai kata “ dapat “ dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dengan makna yang bersifat anjuran. Itu berarti boleh-boleh saja bagi masyarakat disana meminta dispensasi Pengadilan dan boleh juga tidak meminta dispensasi Pengadilan apabila mereka ingin melangsungkan pernikahan.

## **B. Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para orang tua agar tidak mudah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, karena efek yang akan ditimbulkan ketika mereka membina keluarga nanti sangatlah banyak, baik dari segi materil maupun spiritual.
2. Bagi masyarakat terutama bagi para remaja yang merasa ingin menikah muda atau menikah di bawah umur hendaknya memikirkan dengan matang terlebih dahulu tentang kedepannya setelah menikah. Setidaknya kalau memang ingin menikah di bawah umur lengkapilah materi dan mental yang cukup untuk bekal setelah menikah nanti.
3. Sebaiknya Pegawai Pencatat Nikah memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlunya dispensasi bagi yang menikah dibawah umur dan menjalankan sebagaimana mestinya agar pernikahan mereka berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak menjadi masalah dikemudian harinya jika ada yang meminta pembatalan pernikahan tentang pernikahan di bawah umur..

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tala Hukum Indonesia* (Jakarta Gema Insani Press, I 994)
- Abdurrahman Al-jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al'arba'ah* Juz IV (Libanon : Daar al-fikr, 1989)
- Abu Daud Sulaيمان Al-Asy'ast al-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, ( Bairut : Daarul Fikri, 1994)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000 )
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar Fiqih*, (Jakarta: PT: Prenada Media Group, 2003)
- Depag RI, *Pegawai Pencatat Nikah ( PPN)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004)
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Islam, 1991)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putra, 1998)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Hasan M. Noer, *Potret Wanita Shalehah*, ( Jakarta : Penamadani, 2009 )
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Bandung: Fokus Media, 2007)
- Imam al- Ghazali, *Halal dan Haram*, ( Tt : CV. Bintang Remaja, Th )
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perjeraan di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Jakarta: PT: Remaja Rosada Karya, 1991)
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: CV: Al-Hidayah, 1964)
- Rahman Ghozali, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: PT: Prenada Media Group, 2003)
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)

Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No I Tahun 1974 dan KHI (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan No I Th 1974*, ( Yogyakarta Liberti, 1986)

Sulaiman Abdullah, Dr, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Cet. III

Ya'qub, Ismail, *Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali*, ( Singapura : Pustaka nasional PTE LTD, 1998 ), cet. IV

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1993 )

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas Wilayah Kelurahan di Kec. Rimba Melintang .....
Tabel II	: Jumlah Penduduk di Kec. Rimba Melintang Berdasarkan Jenis Kelamin .....
Tabel III	: Penyebaran Penduduk Setiap Kelurahan di Kec. Rimba Melintang .....
Tabel IV	: Jumlah suku di Kec. Rimba Melintang .....
Tabel V	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....
Tabel VI	: Komoditas Pertanian Berdasarkan Jenis dan Luas Tanaman di Kec. Rimba Melintang.....
Tabel VII	: Mata Pencarian Penduduk Kec. Rimba Melintang.....
Tabel VIII	: Jumlah Sekolah di Kec. Rimba Melintang .....
Tabel IX	: Jumlah Penduduk Menurut Agama .....
Tabel X	: Jumlah Tempat Ibadah di Kec. Rimba Melintang.....`
Tabel 1.1	: Umur Para Responden Ketika Menikah .....
Tabel 1.2	: Umur yang Lebih Muda Antara Suami dan Istri Ketika Mereka Menikah.....
Tabel 1.3	: Penyebab Responden Melakukan Pernikahan di Bawah Umur .....
Tabel 1.4	: Alasan Responden Menikah Tanpa Izin Pengadilan Agama.....
Tabel 1.5	: Restu Orang Tua terhadap Responden yang Menikah di Bawah Umur .....
Tabel 1.6	: Tempat Tinggal Responden Setelah Menikah.....
Tabel 1.7	: Kondisi perekonomian Responden Setelah Menikah.....

**Dra. YUSLIATI, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 Exemplar  
Perihal : Pengajuan Skripsi  
**Sdr. SULASAH**

Pekanbaru, \_\_\_\_ Maret 2010  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
dan Ilmu Hukum  
Di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk, serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya terhadap skripsi yang telah ditulis oleh **Sdri. Sulasah**, maka selaku dosen pembimbing skripsi Sdri. Sulasah yang berjudul “**Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di kua kecamatan rimba melintang kabupaten rokan hilir ditinjau menurut administrasi perkawinan di Indonesia**”. Telah dapat diajukan sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasah dan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga sdri. Sulasah dalam waktu dekat dapat dipanggil dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah harapan kami, semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing

**Dra. Yusliati, M.Ag**  
**NIP. 195807071986122001**

## DATA ANGKET

1. Berapa Umur anda ketika menikah?
  - a. 12-13 Tahun
  - b. 14-16 Tahun
  - c. 17-19 Tahun
2. Umur siapakah yang lebih muda antara suami dan istri ketika menikah?
  - a. Suami
  - b. Istri
3. Apa penyebab anda melakukan pernikahan di bawah umur?
  - a. Karena putus sekolah
  - b. Karena Ekonomi
  - c. Karena hamil di luar nikah
  - d. Di jodohkan orang tua
4. Apa alasan anda menikah tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama?
  - a. Tidak di suruh KUA
  - b. Karena ada hubungan keluarga
  - c. Karena tidak tahu sama sekali
5. Bagaimana restu orang tua anda ketika menikah dibawah umur?
  - a. Merestui
  - b. Kurang merestui
  - c. Tidak merestui
6. Dimanakah tempat tinggal anda setelah Menikah?
  - a. Rumah orang tua
  - b. Rumah kontrakan
  - c. Rumah sendiri
7. Bagaimana kondisi perekonomian anda setelah menikah?
  - a. Baik
  - b. Kurang baik
  - c. Tidak baik

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur tersebut?
3. Apa Alasan PPN untuk melangsungkan pernikahan responden di bawah umur?
4. Apa alasan PPN untuk tidak meminta dispensasi dari pengadilan tentang nikah di bawah umur.

## DATA ANGKET

8. Berapa Umur anda ketika menikah?
  - a. 12-13 Tahun
  - b. 14-16 Tahun
  - c. 17-19 Tahun
9. Umur siapakah yang lebih muda antara suami dan istri ketika menikah?
  - a. Suami
  - b. Istri
10. Apa penyebab anda melakukan pernikahan di bawah umur?
  - a. Karena putus sekolah
  - b. Karena Ekonomi
  - c. Karena hamil di luar nikah
  - d. Di jodohkan orang tua
11. Apa alasan anda menikah tanpa Dispensasi dari Pengadilan Agama?
  - a. Tidak di suruh KUA
  - b. Karena ada hubungan keluarga
  - c. Karena tidak tahu sama sekali
12. Bagaimana restu orang tua anda ketika menikah dibawah umur?
  - a. Merestui
  - b. Kurang merestui
  - c. Tidak merestui
13. Dimanakah tempat tinggal anda setelah Menikah?
  - a. Rumah orang tua
  - b. Rumah kontrakan
  - c. Rumah sendiri
14. Bagaimana kondisi perekonomian anda setelah menikah?
  - a. Baik
  - b. Kurang baik
  - c. Tidak baik



## RIWAYAT PENULIS



Nama **Sulasah**, lahir di Karyamukti, 02 Oktober 1986. anak ke-3 dari 6 bersaudara, anak dari pasangan **Achmad Marzuki** dan **Sri Khayati**.

Jenjang pendidikan yang sudah penulis tempuh antara lain: SD 061 Rimba Melintang tamat pada tahun 1999, kemudian melanjutkan di SLTP Bangko kiri tamat pada tahun 2002. dan setelah itu melanjutkan di MAN Dumai dan tamat pada tahun 2005. Kemudian pada tahun 2005 penulis melanjutkan kejenjang perguruan tinggi di Pekanbaru, yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Ahwal al Syakhsiyah.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT tahun 2010 penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di KUA Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir di Tinjau Menurut UU No 1 Tahun 1974** dibawah bimbingan **Dra. Yusliati M. Ag.** Alhamdulillah pada tanggal 28 April 2010 telah mengikuti ujian sarjana dan dinyatakan **"Lulus"** dengan predikat **"Memuaskan"** dengan indeks prestasi kumulatif **3.17** dan menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (**S.H.I.**).

# Persembahan

Terima kasih Allah,  
Yang telah memberi rahmat kepada hamba-Nya,  
Engkau member karunia ilmu yang berguna,  
Lewat orang-orang yang berjasa,

Ayahanda Achmad Marzuki,  
Engkau pelindung dalam keluarga,  
Tempat kami menaruh sejuta harapan,  
Perjuanganmu yang tiada henti siang dan malam,  
Membanting tulang bermandikan keringat,  
Demi ananda dan adinda ini,

Malam berselimut karna kelelahan,  
Semua itu engkau lalui dengan penuh kesabaran dan ketabahan,  
Demi anakmu yang ingin mencapai sebuah cita-cita yang panjang,

Ibunda Sri Khayati,  
Didalam rahimmu aku berada,  
Didalam pangkuan dan pelukanmu aku dibesarkan  
Air susu yang engkau berikan,  
Sekarang ananda dan adinda bias mendapatkan ilmu pengetahuan

Atas doa ayahanda dan ibunda...





# Kasih sayang

Kasih sayang yang engkau berikan,  
Terima kasih engkau yang telah membekali ilmu,  
Dari mulai awal sampai sekarang selalu diiringi dengan doa,  
Tak terasa waktu telah tiba,  
Ananda dan adinda sudah selesai,

Ayahanda dan ibunda tercinta,  
Nasihatmu tidak akan ku lupa,  
Kerinduannya mengiringi langkah dan semangatku untuk menuntut  
ilmu,  
Untuk meraih cita-cita .....

Ayahanda dan ibunda tercinta,  
Dengan segenap rasa ku rangkai untaian cinta kepangkuanmu,  
Kasih yang tak pernah putus,

Terimalah bingkisan ananda dan adinda,  
Terima kasih ayahanda .....,  
Terima kasih ibunda .....

Namamu akan selalu terukir didalam hati sanubari ananda dan adinda,  
Dan selalu mendoakan ananda dan adinda .....,  
Terima kasih atas semuanya.

